

PERAN DAERAH DALAM DIPLOMASI EKONOMI

(The Role of Local Government in Economic Diplomacy)

Adirini Pujayanti

Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Masalah-Masalah Hubungan Internasional
Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Alamat email: adirini.pujayanti@dpr.go.id

Naskah Diterima: 29 Januari 2016

Naskah Direvisi: 13 Mei 2016

Naskah Disetujui: 23 Mei 2016

Abstract

Paradiplomacy with the involvement of local governments as part of Indonesia's multi-track diplomacy is a real demand emerged to meet the realistic demand of international relations in the era of globalization. In paradiplomacy there is a close and reciprocal correlation between the dynamics of the international relations and Indonesia's domestic realities, which is required to set the subject matter of economic diplomacy in integrative and intermestic ways. Paradiplomacy in economics sector could be a part of Indonesia's foreign policy strategy in order to achieve economic goals. Nevertheless, the result of this study indicates that paradiplomacy has been ineffective because national and regional interests have not been integrated.

Keyword: paradiplomacy, economic diplomacy, local government, Indonesia.

Abstrak

Paradiplomasi dengan pelibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi multijalur Indonesia merupakan tuntutan riil dalam hubungan internasional di era globalisasi ini. Dalam paradiplomasi terdapat korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik yang diperlukan untuk menempatkan substansi permasalahan diplomasi ekonomi secara integratif dan intermestik. Paradiplomasi di bidang ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi belum berjalan secara efektif karena belum terpadunya kepentingan pusat dan daerah.

Kata kunci: paradiplomasi, diplomasi ekonomi, pemerintah daerah, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, banyak negara mengkaji kembali kebijakan ekonomi luar negerinya. Tidak hanya menyangkut soal kemakmuran rakyatnya, isu ekonomi dan perdagangan ini juga sangat penting karena terkait kepentingan berbagai aktor hubungan internasional yang saling bersaing.¹ Menipisnya batas-batas teritorial negara bangsa membuat aliran modal dan barang semakin deras melintasi

batas-batas negara. Kondisi ini mendorong negara-negara untuk melakukan investasi di wilayah-wilayah baru yang lebih menjanjikan secara ekonomi.

Setiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengantisipasi tantangan persaingan ekonomi yang semakin ketat di era globalisasi ini. Dalam situasi demikian, kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi ekonomi menjadi hal yang krusial.² Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyadari

¹ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2014, h.25-28.

² Renstra Kemenlu 2015-2019, http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/ENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf, diakses 22 September 2015.

bahwa diplomasi tidak bisa lagi bertumpu pada negara, melainkan juga pada aktor-aktor hubungan internasional selain negara (*non-state actors*), dimana salah satunya adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri. Keterlibatan pemerintah daerah sebagai sub sektor dalam hubungan internasional ini dikenal dengan sebutan paradiplomasi (*paradiplomacy*). Peran mereka semakin penting sebagai bagian dari diplomasi multi-jalur (*multitrack diplomacy*) untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Pemda saat ini harus berperan aktif mencari peluang ekonomi, tidak saja demi kemajuan daerahnya tetapi juga bagi kepentingan nasional. Pemda menjadi mitra dalam diplomasi ekonomi, karena banyak kerja sama internasional yang melibatkan kepentingan daerah. Peran aktif Pemda selaku aktor internasional bagi perjuangan diplomasi ekonomi tersebut dimungkinkan dengan adanya dukungan kebijakan otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 367 yang berbunyi:

Pasal 367

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/ atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. dan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Kedua peraturan perundangan tersebut menggarisbawahi bahwa kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri merupakan sebuah kebutuhan nasional, sehingga pemerintah daerah harus diperkuat perannya. Dalam melaksanakan kepentingan tersebut, Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, sedangkan Pemda sebagai pelaku hubungan luar negeri.

Pelibatan pemda dalam melaksanakan kebijakan luar negeri saat ini dimungkinkan dengan adanya transformasi model tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi, Pemda di Indonesia dapat bergerak lebih cepat melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Dengan hak kewenangan yang dimilikinya, Pemda juga dapat membuka akses kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, baik melalui kerjasama dalam bentuk *sister city/province* maupun bentuk kerja sama lainnya.

B. Permasalahan Penelitian

Di era persaingan ekonomi saat ini, kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia harus terus diperkuat. Globalisasi semakin masif dan komprehensif, dimana peran negara dalam kerja sama internasional bukan satu-satunya aktor (*single actor*). Desentralisasi memberi peluang pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional. Peluang pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri bisa menjadi prioritas dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal ini sejalan dengan salah satu program *Nawacita* yaitu mengutamakan kemandirian daerah dan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah. Langkah ini telah pula diformulasikan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan menambahkan Pemda sebagai salah satu aktor internasional dalam diplomasi Indonesia diharapkan kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia akan bertambah semakin kuat dan integratif. Untuk itu pelaksanaan diplomasi tradisional yang selama ini merupakan ranah kekuasaan pemerintah pusat, harus diubah dengan lebih melibatkan *non-state actors*, termasuk Pemda. Partisipasi daerah dalam kegiatan diplomasi (*paradiplomacy*) akan melengkapi dan memberikan kemanfaatan dalam pembangunan negara secara komprehensif.

Penelitian tentang peran Pemda dalam paradiplomasi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang, ada tiga pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana posisi paradiplomasi dalam politik luar Indonesia?
2. Bagaimana peran paradiplomasi dalam diplomasi ekonomi di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo?
3. Bagaimana kesiapan daerah melaksanakan paradiplomasi bidang ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia.

2. Mengetahui peran paradiplomasi dalam diplomasi ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
3. Mengetahui kesiapan daerah melaksanakan paradiplomasi bidang ekonomi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi anggota Dewan yang terkait seperti Komisi I dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan berdasarkan keinginan untuk dapat memberikan pemahaman atas permasalahan yang diungkapkan melalui metode deskriptif, yaitu menjelaskan temuan dalam bentuk tulisan dan menganalisisnya dengan bantuan teori-teori yang ada.³

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait. Selain di Jakarta dengan pihak Kementerian Luar Negeri, penelitian lapangan juga dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat dengan pihak terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Ekonomi Sekda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Penelitian lapangan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat masing-masing dilaksanakan pada Juni 2015 dan Agustus 2015. Provinsi Sumatera Barat ini dipilih sebagai contoh kerja sama provinsi di luar Jawa dengan tipe *transborder paradiplomacy* dengan Malaysia. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi untuk sektor-sektor unggulan di antaranya sektor energi dan sumber daya mineral, infrastruktur (jalan tol dan lintas

³ Naresh Malhotra, *Basic Marketing Research: Applications to Contemporary Issues, 5 Edition*, London: Prentice Hall, 2002, h. 331-354

kereta api), pariwisata, industri, perkebunan dan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air dan bio energi. Pentingnya provinsi ini dalam paradiplomasi dibuktikan dengan terpilihnya provinsi ini sebagai daerah kunjungan *Diplomatic Tour West Sumatera* yang dikelola Kementerian Luar Negeri, untuk peninjauan Penanaman Modal Asing (PMA) pada Mei 2015.

Sementara Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai contoh kerja sama provinsi di Pulau Jawa dengan tipe *global paradiplomacy*. Provinsi ini memiliki keunggulan potensi investasi dibanding provinsi lain di Indonesia. Potensi tersebut diantaranya industri manufaktur, ekonomi kreatif, pertanian (basis lumbung padi nasional), tekstil, infrastruktur yang baik, serta potensi penduduknya yang besar.⁴ Provinsi Jabar membentuk West Java Incorporated (WJI), secara spesifik tujuan pembentukan WJI adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah Jawa Barat melalui peningkatan daya saing pelaku ekonomi. Mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian diantara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha, khususnya di bidang industri, perdagangan, pariwisata, investasi, dan pembiayaan agar tidak saling tumpang tindih, terlebih dengan adanya otonomi daerah.⁵

E. Kerangka Pemikiran

Paradiplomasi (*paradiplomacy*) menunjuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh entitas sub-negara (daerah) di arena internasional untuk tujuan tertentu.⁶ Paradiplomasi yang melibatkan daerah dalam urusan internasional dilakukan dengan aktif dalam urusan internasional dengan beragam cara, seperti membuka kontak perdagangan dan misi budaya ke luar negeri, mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan

negara-negara asing maupun aktor internasional non-negara, serta berpartisipasi dalam jaringan kerjasama internasional.⁷

Dalam menjalankan diplomasinya, aktor sub-nasional ini dapat mendirikan perwakilan dan memiliki kontak formal maupun informal, permanen maupun *ad hoc*, dengan entitas pemerintah maupun swasta asing di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan sosial ekonomi, politik ataupun dimensi kepentingan lainnya, sesuai dengan amanat konstitusi atau kompetensi yang dimilikinya.⁸ Aktivitas paradiplomasi sendiri merupakan '*low diplomacy*' yang berbeda dengan '*high diplomacy*'. *High diplomacy* merupakan domain pemerintah nasional, sementara *low diplomacy* menjadi arena Pemda dan biasanya mencakup beragam bentuk kerja sama di seputar masalah perkotaan dan kaum urban.⁹

Aktivitas *paradiplomacy* meliputi tiga bidang yaitu politik, ekonomi dan budaya yang saling terkait. Di Indonesia kegiatan paradiplomasi masih di tataran politik tingkat rendah, yaitu lebih banyak menjalin persahabatan antara wilayah yang berlanjut pada kerja sama ekonomi dan tetap di bawah koordinasi serta supervisi pemerintahan pusat (negara/nation-state). Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian utama, yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis terkait.¹⁰ Bidang yang dikerjasamakan merupakan unggulan

⁴ Gubernur BI: Investasi Jabar Unggul Dibanding Provinsi Lain, 13-November-2014, binesia.com/home/berita/2981, diakses 7 April 2016.

⁵ West java Inc, <http://www.westjavainc.org/tentang/west-java-inc/> diakses 18 April 2016.

⁶ Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf, diakses 30 Maret 2015.

⁷ Alexander S. Kuznetsov, *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, London:Routledge, 2015, h.1-21.

⁸ Noé Cornago, *Exploring the Global Dimensions of Paradiplomacy Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in International Affairs*, October 2000, <http://www.forumfed.org/en/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-int-cornago.pdf>, diakses 30 Maret 2015.

⁹ Hsu 2003, 19 dalam de Villiers 2006 dalam Faris Ihsan, *Peluang Pemda Dalam Kerja sama Internasional*, <http://bkddiklat.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/PELUANG-PEMDA-DALAM-KERJASAMA-INTERNASIONAL.pdf>, diakses 8 April 2016.

¹⁰ Kurniawan Ariadi, Paradiplomasi, otonomi daerah dan hubungan luar negeri, diakses <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F21849/Paradiplomasi.htm>, pada tanggal 8 April 2016.

daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dan kemampuan teknis dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri dan pariwisata. Bidang sosial budaya meliputi kerjasama pelatihan SDM, iptek, pemberian beasiswa pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan olah raga. Motivasi terkuat yang melatarbelakangi munculnya keinginan daerah untuk melakukan kegiatan diplomasi adalah kepentingan ekonomi. Daerah berupaya menarik investasi asing ke wilayahnya dan menargetkan pasar ekspor baru.

Paradiplomasi sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah lokal dalam bidang hubungan luar negeri diperlukan seiring dengan diterimanya paham diplomasi multijalur (*multi-track diplomacy*) sebagai tuntutan riil kehidupan hubungan internasional. Diplomasi multijalur dalam melaksanakan politik luar negeri memunculkan elemen "*transendental*" yang menipiskan sekat tebal yang menghubungkan faktor internasional dan faktor domestik dalam mengelola diplomasi.¹¹ Konsep ini melibatkan negara sebagai *state actor* dan Pemda sebagai *non state actor*. Keterlibatan daerah sebagai salah satu "*track*" dan aktor dari pelaksanaan diplomasi sangatlah penting. Pemberdayaan seluruh aktor hubungan internasional dalam kerjasama luar negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi yang disebut *Total Diplomacy*.¹² Orientasi praksis kebijakan ini adalah menempatkan substansi permasalahan secara integratif, terutama dalam perspektif internasional-domestik. Cara pandang tersebut menciptakan korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik Indonesia dalam skala yang lebih luas.

Paradiplomasi ini dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional. Hal ini

karena dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi kepentingan nasional. Konsep diplomasi tradisional yang merupakan ranah milik pemerintah pusat telah mengalami pergeseran dengan masuknya berbagai aktor baru, diantaranya pemerintah daerah. Sebagai aktor internasional, Pemda dapat berperan penting dalam hubungan internasional. Peran Pemda dalam politik luar negeri ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri resmi dari pemerintah pusat.

Di Indonesia, kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 367. Pasal ini mengatur soal kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri yang meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping peraturan perundangan di atas, terdapat beberapa dasar hukum lainnya yang juga menjadi acuan daerah dalam upaya membangun kerjasama luar negeri. Peraturan yang dimaksud antara lain:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

¹¹ Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri, 2006, h. 14.

¹² Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, Bab V.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Kerjasama Ekonomi:
 1. Perdagangan
 2. Investasi
 3. Ketenagakerjaan;
 4. Kelautan dan Perikanan
 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 6. Kehutanan
 7. Pertanian
 8. Pertambangan
 9. Kependudukan
 10. Pariwisata
 11. Lingkungan Hidup
 12. Perhubungan.
- b. Kerjasama Sosial Budaya:
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Kepemudaan
 4. Kewanitaan
 5. Olahraga
 6. Kesenian.

c. Bentuk Kerjasama Lain.

Dalam hal paradiplomasi ini, Kementerian Luar Negeri memiliki posisi sebagai Koordinator yang berwenang memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis terhadap

program kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.¹⁴ Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
- c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
- f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kerjasama luar negeri juga harus mempertimbangkan aspek keamanan yang ditinjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

- a. Politis. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
- b. Keamanan. Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
- c. Yuridis. Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.

¹³ *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri, 2006, h. 14.

¹⁴ *Ibid*, h. 19-20.

d. Teknis.

Kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

Dalam hal ini, pemerintah pusat tetap merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam kebijakan luar negeri, terlepas dari seberapa besar otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap menjadi pengontrol partisipasi daerah di arena internasional, setidaknya untuk memastikan koherensi dengan kebijakan luar negeri secara nasional.

Dalam implementasinya, Ivo Duchacek menjelaskan terdapat tiga tipe paradiplomasi.¹⁵ Tipe *pertama* adalah *transborder paradiplomacy*. *Transborder paradiplomacy* ini menunjuk pada hubungan institusional, baik formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Kerjasama ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah di antara mereka. Tipe *kedua* adalah *transregional paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun negara di mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan. Tipe yang *ketiga* adalah *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Tiga bentuk paradiplomasi ini sangat mungkin berkembang dan memberi kontribusi memperkuat dan melengkapi pada kinerja diplomasi pemerintah pusat.

Paradiplomacy yang difokuskan pada pengembangan ekonomi, khususnya untuk menarik investasi luar negeri, tentu memerlukan strategi tertentu. Strategi tersebut diantaranya menargetkan jenis investasi tertentu guna

melengkapi kegiatan perekonomian daerah yang telah ada, dan atau untuk mengembangkan kluster ekonomi khusus. Daerah juga harus mempelajari insentif yang akan dikemas seperti insentif keuangan, pajak, lokasi dan dukungan infrastruktur. Untuk kerja sama di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memerlukan bantuan pemasaran dan promosi ekspor, pemerintah daerah yang akan bersinergi dalam kerja sama internasional perlu terlebih dahulu memetakan komplementaritas dan sinergi untuk meningkatkan daya saing pasar.

Untuk menjamin suksesnya *paradiplomacy*, pemerintah daerah memerlukan pemahaman mengenai kekuatan yang akan melengkapi kemitraan antara pemerintah daerahnya dengan pemerintah daerah dari negara lain dan bagaimana hal ini dapat tercapai. *Pertama*, daerah yang akan melakukan kerja sama memiliki tingkat pembangunan yang sama, atau paling tidak memiliki kebutuhan yang dapat saling melengkapi, memiliki keahlian dan sumber daya.¹⁶ *Kedua*, adanya kelembagaan, yaitu adanya unsur dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai *interlocutor* (penghubung dan penengah) yang akan menjembatani dan mengumpulkan berbagai kepentingan yang ada di wilayah tersebut. *Ketiga*, daerah yang akan bekerja sama memiliki struktur, kewenangan dan kekuatan yang serupa. Faktor-faktor tersebut diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan, misalnya salah satu daerah memiliki kewenangan legislatif, administratif dan keuangan yang tinggi sementara daerah yang akan diajak bekerja sama hanya memiliki status kota tanpa kewenangan tinggi.¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Paradiplomasi diyakini telah menjadi tuntutan kebutuhan daerah saat ini dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan

¹⁵ Kurniawan Ariadi, "Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia", <https://godedeahead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luar-negeri-indonesia/> 16 Desember 2009, diakses 29 September 2015.

¹⁶ Michael Keating, *Paradiplomacy and Regional Networking*, www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-eu-keating.pdf, diakses 30 Maret 2015.

¹⁷ *Ibid.*

potensi daerahnya. Arus informasi, pergerakan modal dan migrasi manusia, membuat daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak akan mampu mengelakkan diri dari pengaruh internasional sekaligus berhadapan dengan berbagai kesempatan mendapatkan sesuatu yang positif bagi kepentingan daerah sekaligus kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu ada konsep baru dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia dimana kemampuan daerah kabupaten/kota harus diperkuat dalam pelaksanaan diplomasi.¹⁸ Tanggung jawab pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh pemerintah, tentunya tidak hanya terletak di tangan pemerintah pusat saja. Pemerintah Pusat perlu bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai salah satu *non-state actor* dalam hubungan internasional memanfaatkan paradiplomasi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri baik, baik yang berupa kerjasama pemanfaatan potensi alam maupun peningkatan kualitas manusia. Kerjasama ini dilakukan agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan pembangunan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemda berupaya membuka kontak perdagangan dan misi budaya ke luar negeri, mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan negara-negara asing maupun aktor internasional non-negara, berpartisipasi dalam jaringan kerjasama internasional. Umumnya tidak mendirikan perwakilan permanen, tetapi melakukannya secara *ad hoc* karena masih menganggap hubungan luar negeri adalah ranah pemerintah pusat. Meski demikian, Pemda Provinsi Sumatra

¹⁸ Bahan paparan Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada kunker Komisi I pada tanggal 13 November 2014.

Barat, misalnya, telah mendirikan perwakilan permanen di Kota Seremban Malaysia. Hanya saja faktor keterbatasan anggaran, menyebabkan kantor perwakilan ini tidak berjalan efektif.¹⁹

Di samping faktor ekonomi, motivasi kedua terbesar dalam kerja sama paradiplomasi di Indonesia adalah kerja sama bidang sosial budaya. Memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia merupakan salah satu cara untuk menjalin kerja sama. Dimulai dengan pagelaran budaya selanjutnya kegiatan paradiplomasi akan lebih mudah dikembangkan, baik untuk kerjasama terkait upaya peningkatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, wanita, olah raga dan seni, maupun kerjasama bidang ekonomi.

Paradiplomacy yang paling populer di Indonesia adalah kerja sama *sister city/sister province*. Konsep ini merupakan hubungan kerja sama kemitraan antara dua kota atau dua provinsi dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Permendagri No. 1 tahun 1992 menyebutkan bahwa kerjasama *sister city* adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Dalam perkembangannya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kerjasama model tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri, persyaratan ini meliputi persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan NKRI, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung keutamaan gender dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Bagi negara-negara berkembang kerjasama *sister city/sister province* diharapkan dapat menjadi

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hendry, Kabid Ekonomi Bappeda Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015.

²⁰ *Sister City Bandung Colorful, Beautiful and Friendly*, Bandung; Bagian Kerjasama Daerah Pemda Bandung, 2013, h. 8.

jembatan bagi terbentuknya pemahaman antar kebudayaan serta transfer teknologi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Kemitraan bilateral tersebut diharapkan menjadi proses kerja sama alih teknologi dan informasi, bantuan pendanaan, peningkatan SDM untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Hal ini dapat menjadi langkah efektif sepanjang kerja sama tersebut memiliki program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan. Setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama atas potensi unggulan yang dapat dikerjasamakan.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menjalin kerja sama sister province dengan Provinsi Fes-Boulmane di Maroko sejak 2014, Negara Bagian Bavaria Bayern di Jerman tahun dan dengan Prefecture Kagawa Jepang di tahun 2010. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berharap melalui kerjasama tersebut akan terjadi kerja sama perdagangan, investasi di bidang pariwisata, budaya, pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan serta energi terbarukan. Di lain pihak, Bavaria Bayern, misalnya, juga memiliki kepentingan untuk menjalin kerjasama dengan provinsi ini. Diberitakan Pemerintah negara bagian di Jerman ini menilai pentingnya kerjasama dengan negara berpenduduk muslim untuk “mengcounter isu sara” yang sedang merebak di Jerman saat itu (2011).²¹ Oleh karena itu, Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang religius dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam menjadi pilihan partner kerja sama yang sangat cocok. Sedangkan Prefecture Kagawa merupakan daerah penghasil produk pertanian, peternakan dan perikanan yang penting di Jepang. Namun, prefektur ini memiliki wilayah yang tidak luas, sangat tidak

sebanding jika disandingkan dengan luasnya Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, sekalipun Provinsi Sumatera Barat memiliki kesepakatan kerja sama ekonomi sister province dengan Bavarian Bayern dan Kagawa di atas, perbedaan kondisi dan kepentingan antara masing-masing province tersebut membuat kerjasama kurang efektif.

Di samping kerjasama sister province di atas, beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat juga telah menjalin kerjasama sister city dengan kota-kota dari negara lain. Kota Padang, misalnya, telah menjalin kerjasama sister city dengan beberapa kota di dunia, yaitu kota Hildesheim di Jerman, Vung Tau di Vietnam, Beit Lahiya di Palestina, Chonburi di Thailand, Perth di Australia dan Dubai di Uni Emirat Arab. Sister city antara Padang dengan Perth sangat potensial, karena adanya banyak kemiripan di antara kedua kota tersebut. Selain sama-sama di pesisir Samudera Hindia, Padang dan Perth juga merupakan kota perdagangan, kelautan, dan pendidikan. Kondisi ini dipandang akan memudahkan dua hal kerjasama yang akan dilakukan Padang dalam program Sister City yakni saling memperkuat manajemen perkotaan, edukasi dan pariwisata, juga segitiga pertumbuhan ekonomi antara Padang-Perth-Dubai. Pertumbuhan segitiga dengan Dubai diharapkan walikota Padang Mahyeldi Ansharullah karena saat ini ada penerbangan Emirates dan Etihad dari Perth ke Dubai yang melewati wilayah angkasa Sumatera Barat. Walikota Padang berharap kedua penerbangan tersebut melakukan transit di Padang sebelum melanjutkan perjalanan ke Dubai.²² Adanya rute ini dapat menjadikan Padang sebagai kota transit, terutama karena ada ratusan wisatawan Australia yang datang ke Sumbar setiap bulannya untuk berwisata selancar di daerahnya. Adanya penerbangan langsung dari Perth ke Padang akan memudahkan perjalanan wisatawan Australia menuju Padang yang akan secara langsung dan tidak langsung

²¹ <http://archive.kaskus.co.id/thread/5842949/0/ini-hasil-kerja-gubernur-sumbar-oleh2-jerman>, diakses 2 Mei 2016.

²² Tingkatkan Kerjasama, Padang-Perth Jadi Sister City, <http://kabar24.bisnis.com/read/20150911/19/471535/tingkatkan-kerjasama-padang-perth-jadi-sister-city>, diakses 2 Mei 2016.

dapat membantu peningkatan pariwisata kota tersebut. Selain itu, Padang juga memiliki potensi jemaah umroh haji yang sangat besar ke Saudi, yaitu berkisar 3.000 orang per bulan. Oleh karenanya, rute penerbangan Perth Dubai via Padang dinilai Pemda Padang layak dikembangkan. Kerja sama perdagangan akan meningkatkan daya saing kedua kota dan kawasan barat, baik kawasan Sumatra bagian barat maupun Australia Barat, yang tersisihkan menyusul pesatnya pertumbuhan kawasan Pasifik. Meski mempunyai potensi besar, kerja sama ini tidak mudah dilaksanakan, karena membutuhkan dana yang besar dan melibatkan pihak ketiga yakni maskapai Emirates dan Etihad.

Selain kota Padang, kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat juga melakukan sister city dengan kota Seremban di Negeri Sembilan Malaysia. Ini merupakan kerja sama tipe *transborder paradiplomacy*. Hubungan antara dua kota tersebut ditandatangani tanggal 6 Desember 1986. Kedua kota sekalipun memiliki kondisi geografis yang berbeda, kerja sama tetap dilakukan karena hubungan sejarah dan kebudayaan yang telah lama terjalin di antara mereka. Kota Seremban merupakan kawasan pemukiman, sedangkan fokus kota Bukittinggi adalah daerah pariwisata dan perdagangan. Kerja sama perdagangan yang dipandang paling mungkin sukses di Bukittinggi adalah kerja sama yang ditujukan untuk pengembangan UKM, terutama kerajinan sulam dan makanan. Daerah ini merupakan produsen bagi kedua produk tersebut. Namun sayangnya, kedua bidang tersebut belum menjadi fokus perhatian utama Pemda, karena masih berupa industri rumahan yang belum secara signifikan memberi masukan pada daerah. Perbedaan visi tersebut menyebabkan kesepakatan kerja sama *Sister city* yang ditandatangani menjadi tidak efektif dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah. Kerja sama kedua negara lebih bersifat sejarah dan budaya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara bertetangga. Dalam konteks ini peran Pemda Bukit Tinggi dan Seremban lebih kepada pelibatan aktor-aktor lokal dalam mempererat

hubungan kedua negara yang berbatasan untuk membantu mengurangi beban persoalan perbatasan di pusat.²³

Berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjalin sister province model *global paradiplomacy* dengan negara bagian Australia Selatan, Provinsi Chollanamdo di Korea Selatan, Provinsi Shandong di RRC. Jabar menjalin Pernyataan Kehendak (Lol) dengan Provinsi Henan dan Heilongjiang di RRC, Negara Bagian Guanajuato di Meksiko, Negara Bagian Victoria di Australia. Sementara ibukota Jawa Barat Bandung menjalin kerja sama sister city dengan kota Braunschweig di Jerman, Fort Worth di AS, Suwon di Republik Korea, Liuzhou, Shenzhen dan Yingkou di RRC, Petaling Jaya di Malaysia. Di tahun 2015, Provinsi Jawa Barat dan Negara Bagian South Australia memperbarui *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerja sama sister province. South Australia ingin dekat dengan Indonesia dan jadi gerbang utama ke Asia. Kerja sama kedua pihak yang telah disepakati tersebut difokuskan pada beberapa sektor, seperti budaya dan pariwisata, kesehatan, hasil laut, pertanian, dan pendidikan internasional. Kedua pihak menyadari banyak peluang kerjasama yang bisa digali.

Pemda Provinsi Jawa Barat memfokuskan paradiplomasi pengembangan ekonomi, khususnya untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI). Paradiplomasi ini memerlukan strategi tertentu seperti menargetkan jenis investasi tertentu untuk melengkapi perekonomian daerah yang telah ada atau untuk mengembangkan kluster ekonomi khusus²⁴. Keseriusan Pemda Jabar untuk menangani masalah tersebut diindikasikan dengan pendirian institusi khusus yang dikenal dengan Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Biro

²³ Suyatno, "Globalisasi, Perbatasan Indonesia-Malaysia dan Local Governance" dalam *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Ludiro dkk (ed.) Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 143-145.

²⁴ Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, Tabloid Diplomasi Edisi Mei 2012.

Investasi. Kerjasama luar negeri Jabar masih difokuskan pada upaya memperkuat pasar dengan negara-negara mitra tradisional di Asia Timur dan Pasifik.²⁵ Sebagai langkah strategis Jawa Barat mengembangkan cluster ekonomi strategis di Bekasi dan menawarkan paket seluruh dukungan, termasuk insentif keuangan dan dukungan infrastruktur. Kawasan industri Jababeka yang diminati banyak perusahaan nasional dan multinasional. Namun demikian Pemda Jabar masih memandang perlu untuk terus membenahi diri agar dapat memainkan peranan yang lebih penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global, di antaranya dengan lebih gencar melakukan diplomasi jemput bola kepada calon PMA potensial. Hal ini perlu diperkuat oleh “campur tangan” pemerintah pusat dan daerah (khususnya Bekasi) agar sinergi ketiga aktor diplomasi ekonomi ini dapat lebih efektif dalam upayanya menjadi kekuatan utama diplomasi ekonomi nasional yang pada gilirannya akan dapat memajukan kepentingan ekonomi daerah dan nasional.²⁶

Pemda kota Bandung juga melaksanakan *global paradiplomacy* diantaranya dengan kota Braunschweig di Jerman, Fort Worth di Texas AS, Suwon di Korea Selatan, kota Liuzhou, Yingkou dan Shenzhen di Tiongkok dan Petaling Jaya di Malaysia.²⁷ Pemda Bandung secara strategi mengembangkan kerja sama ekonomi daerah berdasarkan peluang serta potensi yang dimilikinya. Kerjasama Sister City dilaksanakan berdasarkan kepentingan visi kota yang bersangkutan, yakni Bandung Nyaman, Unggul dan Sejahtera. Kerja sama sister city diarahkan pada pembangunan ekonomi dan pariwisata karena kerja sama bidang ini lebih konkrit dan sinergis untuk kepentingan publik. Program ini bermanfaat sebagai solusi di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya kota. Namun

bantuan kerja sama diarahkan tidak berupa uang, tetapi beasiswa kepada untuk menjalani pendidikan atau pelatihan SDM di bidang kesehatan, iptek, ekonomi dan pariwisata, serta sosial budaya yang terkait kepentingan publik. Program kerjasama kota Bandung mendapat sambutan dari mitranya di luar negeri karena sesuai dengan filosofi kerja sama dalam *Sister Province* yaitu *goodwill*, semangat untuk saling mengenal dan mempromosikan potensi masing-masing daerah.

Berdasarkan gambaran praktik paradiplomasi di atas, kerja sama *sister province/city* yang ditandatangani oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan mitra-mitranya di luar negeri dapat menjadi efektif atau tidak sangat bergantung pada proses “*matchmaking*” di awal kegiatan. Tanpa mitra yang tepat kerjasama tersebut tidak akan efektif, karena tidak mempunyai fokus yang jelas mengenai tujuan kerjasama. Proses “*matchmaking*” yang tidak tepat tersebut dapat terjadi karena proses yang dilalui tidak melalui analisis mendalam. Terkadang pula terjadi pembuatan MoU yang sifatnya tergesa-gesa, karena mengejar rencana kunjungan pejabat tingkat tinggi. Analisis kebutuhan, keunggulan, kelemahan dan komplementaritas dari kerjasama yang akan dilakukan pun seringkali menjadi terlewatkan. Akibatnya, pasca penandatanganan MoU, kerja sama yang terlihat bagus di atas kertas tidak dapat terwujud atau tidak efektif. Sektor yang akan dikerjasamakan bukan merupakan unggulan dan komplementaritas yang dibutuhkan daerah. Kedua pihak tidak memiliki fokus yang sama pada bidang yang akan dikerjasamakan karena tidak memahami kebutuhan, potensi, persamaan dan komplementaritas sektor-sektor yang akan dikerjasamakan serta keunggulan masing-masing daerah. Selain itu pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta sehingga target kerja sama yang telah difokuskan dapat tercapai. Tanpa dukungan masyarakat dan pihak swasta kerja sama sister city/province yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif.

²⁵ Wawancara dengan Neni Rohaeni, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Otda dan Kerja Sama Pemda Jabar, pada tanggal 26 Agustus 2015.

²⁶ Wawancara dengan Sastie. Y.D, Subbid Fasilitasi dan Kerjasama Bidang penanaman modal BMPT Pemda Jabar, pada tanggal 26 Agustus 2015.

²⁷ *Sister City Bandung Colorful, Beautiful and Friendly*, Bandung; Bagian Kerjasama Daerah Pemda Bandung, 2013.

B. Paradiplomasi dalam Diplomasi Ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019)

Ekonomi dan perdagangan menjadi isu yang melintasi batas negara. Globalisasi ekonomi melibatkan pergeseran kualitatif ke arah perekonomian dunia yang tidak lagi didasarkan kepada otonomi perekonomian nasional, tetapi lebih didasarkan pada pasar global terkonsolidasi untuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Terjadi proses integrasi ke dalam dimana ekonomi global tunggal mendominasi sejumlah perekonomian nasional yang terkandung didalamnya.²⁸ Berbagai faktor menjadi penyebab kondisi tersebut, diantaranya surplus kapital yang mendorong perluasan investasi di wilayah-wilayah baru yang menjanjikan, baik pasar maupun bahan baku demi surplus lebih lanjut. Globalisasi ekonomi dan perdagangan ditopang oleh ketersediaan infrastruktur, teknologi informasi dan semakin rendahnya biaya transportasi yang memungkinkan dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu cepat. Akibatnya, ekonomi negara-negara nasional menjadi semakin tergantung satu dengan yang lain dalam lingkup global. Dalam interdependensi ekonomi global ini kebijakan ekonomi satu negara tidak dapat dilepaskan pengaruhnya terhadap negara lain.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Kabinet Kerja 2014-2019 mencanangkan kebijakan pembangunan untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Kabinet Kerja berpedoman pada agenda prioritas nasional yang intinya antara lain tekad untuk kembali menghadirkan negara dalam melindungi warganegara, meningkatkan kualitas hidup bangsa dengan kemandirian ekonomi dan membangun karakter bangsa yang berlandaskan kebhinekaan. Presiden Jokowi menggagas Sembilan program/Nawa Cita untuk

menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang dicita-citakan tersebut. Dalam tulisan ini penekanan ada pada Nawacita ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Inti dari nawacita ketiga adalah slogan “daerah membangun,” artinya, pembangunan Indonesia harus berpola *bottom up* yaitu pembangunan nasional dimulai dari daerah. Pembangunan daerah dimulai dengan menganalisis potensi atau keunggulan daerah. Secara tidak langsung merupakan alat untuk menentukan dan menganalisis perekonomian daerah, terutama potensi daerah.²⁹

Dalam upaya mendukung perwujudan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi, kebijakan perdagangan nasional harus mendukung integrasi ke dalam rantai pasok global. Perdagangan abad ke-21 berbeda dengan perdagangan abad ke-20 yang mengedepankan metode perdagangan barang konvensional atau barang jadi. Rantai Pasok Global menandai perubahan paradigma yang mendasar, yaitu sebuah bentuk perdagangan yang lebih kompleks, terintegrasi penuh dan sekaligus juga terpecah-pecah. Kini perusahaan multi nasional bisa dikoordinasikan secara cepat dan dilakukan secara parsial di berbagai lokasi yang paling efisien. Perdagangan abad 21 semakin menyatukan perdagangan, investasi dan jasa menjadi satu poros utama. Dalam realita global tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan negara yang berdikari dalam bidang ekonomi. Perdagangan mendorong inovasi dan kemajuan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan antara kinerja perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tidak terjadi secara natural. Pemerintah harus turun tangan memberi kesempatan pada daerah untuk memperlihatkan potensinya dan menjadi bagian dari rantai pasok global.

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional – Teori dan Pendekatan*, edisi ke lima, terjemahan Dadan Suryadipura, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013, h.342-343.

²⁹ “Analisis Perekonomian Daerah” Mendukung Nawacita ketiga, 1 Juni 2015, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-knpk/21320-%E2%80%9CAnalisis-perekonomian-daerah%E2%80%9D-mendukung-nawacita-ketiga>, diakses 26 April 2016.

Era globalisasi membuka peluang baru diantaranya tersebarnya pasar yang berskala lebih luas dan terdiversifikasikan untuk barang produk manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Banyak terjadi relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Dalam kondisi tersebut perlu diciptakan lingkungan usaha yang kondusif, antara lain untuk menarik investasi dan mendukung peningkatan produktifitas menghadapi persaingan ekonomi yang semakin tajam. Setiap pemerintah harus siap dengan strategi untuk memberdayakan kemampuan bangsanya, termasuk menyediakan *fund and forces* serta mobilisasi sumber daya manusia.³⁰ Seluruh pihak terkait harus terlibat, tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan dan industri, termasuk Pemda.

Berpedoman pada agenda prioritas Presiden Jokowi, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasinya diplomasi Indonesia diharapkan dapat menampilkan profil diplomasi yang membumi (*down-to-earth diplomacy*), yaitu diplomasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, serta bermanfaat dan terkoneksi dengan kebutuhan rakyat (*diplomacy for the people*). Dalam upaya memastikan gerak langkah diplomasi agar memberi manfaat bagi rakyat dan menegakkan wibawa negara dalam hubungan internasional, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 3 (tiga) prioritas dalam hubungan luar negeri dimana salah satunya diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi dilaksanakan untuk membantu meningkatkan perekonomian bangsa.

Presiden Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi akan bisa Indonesia raih sesuai dengan target, bila terjadi *foreign direct investment* terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan industri, baik industri padat karya maupun *high technology*.³¹ Setiap

Perwakilan Indonesia di luar negeri diminta mempromosikan peluang bisnis di dalam negeri kepada pihak luar negeri, selain mempresentasikan peluang bisnis di luar negeri pada pengusaha Indonesia. Oleh karena itu Presiden Jokowi menekankan setiap diplomat Indonesia adalah *marketer* yang harus mampu mencari peluang ekonomi bagi kepentingan nasional Indonesia.³²

Dalam diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri berperan penting membantu promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual.³³ Kegiatan Informasi Akses dan Peluang Bisnis merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan Kementerian Luar Negeri untuk membumikan diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat bermanfaat langsung kepada daerah. Peran perwakilan di luar negeri sangat penting sebagai agen informasi. Mereka harus bekerja secara optimal untuk melakukan identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik.

Indonesia memiliki ekonomi yang relatif terbuka, sehingga perdagangan internasional menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia.³⁴ Perdagangan dunia telah mengalami ekspansi sangat besar dalam beberapa dekade terakhir ini dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, keuangan dunia dan sistem perdagangan yang lebih terbuka. Seiring

³⁰ R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, edisi kedua, Bogor; Ghalia Indonesia, 2005, h. 380-381.

³¹ Presiden Jokowi Minta Para Dubes Indonesia Kedepankan Diplomasi Ekonomi, <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-minta-para-dubes-indonesia-kedepankan-diplomasi-ekonomi/2624301.html>, diakses 13 Februari 2015.

³² Arahan Jokowi, Diplomat Harus Ubah Mindset Jadi Pedagang, <http://news.detik.com/read/2015/02/02/125553/2820865/10/arahan-jokowi-diplomat-harus-ubah-mindset-jadi-pedagang?n991102605>, diakses 11 Februari 2015.

³³ Rana, S. K. *Economic Diplomacy: the Experience of Developing States*, dalam *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire: Ashgate Publishing, 2007, h. 204-207.

³⁴ Ratna Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008, h.1.

dengan semakin kompleksnya proses kerjasama internasional, negara-negara dituntut untuk mampu meningkatkan kapabilitas mereka dalam menangani permasalahan ekonomi internasional, khususnya di bidang perdagangan. Dalam mengelola relasi ini, diplomasi ekonomi merupakan media yang paling dominan dan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan peluang dari globalisasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri Indonesia secara *ad hoc* membentuk *task force* khusus ekonomi yang siap menindaklanjuti dan jembatani apa yang menjadi masukan dan *concerns* para pengusaha sehingga bisa sinergis dan lebih optimal.³⁵ *Task force* akan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang selama ini terbengkalai, memfasilitasi melalui perwakilan yang ada di luar negeri dan membantu melakukan negosiasi dengan negara tertentu bila diperlukan.³⁶

Strategi pengembangan ekspor yang dilaksanakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:³⁷

1. Strategi pengembangan ekspor akan disesuaikan dengan karakteristik pasar tujuan ekspor masing-masing;
2. Mengoptimalkan hasil *market intelligence* dari perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai masukan dalam pengembangan produk, identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, mengetahui hambatan perdagangan, serta sistem jaringan logistik dan distribusi, dalam menentukan dan menyusun strategi yang tepat dan efektif;
3. Melakukan program promosi yang terpadu dan tersinergi, baik antar kementerian pemerintah, maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui pameran dagang, misi dagang, *instore promotion*, *buying mission*

dan misi pembelian serta menyelenggarakan pameran internasional di dalam negeri misalnya *Trade Expo Indonesia*, agar jumlah pelaku usaha yang dapat ikut lebih banyak dengan biaya yang murah;

4. Membangun pusat-pusat promosi di negara akreditasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun mendorong keikutsertaan/partisipasi swasta sebagai *windows of Indonesia*/etalase produk Indonesia langsung di negara target pasar, baik melalui *House of Indonesia*, *Inkubasi Bisnis*, *Trading House*, *Indonesia Inc.*, *Windows of Indonesia* (WOI) dan *Permanent Trade Display*;

Presiden Joko Widodo mengangkat diplomasi ekonomi sebagai isu strategis dalam kebijakan pemerintahannya. Selama ini kiprah Indonesia dalam politik internasional telah memberikan keuntungan politis berupa nama baik di tingkat internasional. Keuntungan politis tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.³⁸ Presiden Joko Widodo mengarahkan kebijakan diplomasi ekonomi pada kepentingan rakyat Indonesia, pro rakyat, atau "*diplomacy for the people*". Di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional, serta mengamankan kepentingan ekonomi strategis lainnya. Guna mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan kesiapan ekonomi domestik yang merupakan bagian penting bagi diplomasi ekonomi. Terbukanya wawasan dan pasar luar negeri diharapkan mampu meningkatkan daya saing negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, diplomasi ekonomi diartikan sebagai upaya pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan di bidang ekonomi, yang mencakup perdagangan komoditas, investasi, pariwisata,

³⁵ Dukung Diplomasi Ekonomi, Kemlu Bentuk Task Force Khusus, 23 Januari 2015, <http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=625&l=id>, diakses 28 Januari 2015.

³⁶ I Gede Ngurah Swajaya, Ketua Pelaksana Harian Pokja Diplomasi Ekonomi, wawancara tanggal 10 April 2015.

³⁷ <http://pokjaekonomi.kemlu.go.id/id/perdagangan>, diakses 29 Juli 2015.

³⁸ Renstra Kemenlu 2015-2019, *Op.cit.*

ketenagakerjaan dan kerja sama teknik yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, mendukung pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di kancah global.³⁹ Untuk itu, kekuatan atau modalitas domestik perlu dikembangkan dan reorientasi diplomasi ekonomi perlu dilakukan.⁴⁰ Optimalisasi diplomasi ekonomi di era globalisasi membutuhkan dukungan banyak pihak. Kekuatan globalisasi ekonomi memaksa banyak negara untuk memperkuat kembali kebijakan ekonomi luar negerinya. Dalam kondisi ini dukungan Pemda dibutuhkan, karena tingkat kesiapan domestik dan daya saing sebuah negara akan menentukan pula kapasitas (*capacity*) dan kemampuan (*capability*) ekonomi nasional suatu negara dalam arena ekonomi dan politik global.⁴¹ Daerah harus siap karena tingkat kesiapan domestik yang rendah dimaknakan sebagai rendahnya daya saing suatu negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan dibandingkan dengan negara lainnya.

Diplomasi ekonomi merupakan hal yang krusial pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.⁴² Pencapaian target kinerja diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kondisi dalam negeri, termasuk dalam hal ini partisipasi daerah. Di era digital kehadiran fisik para diplomat ke daerah dapat diatasi dengan kemudahan informasi mengenai potensi daerah dapat diakses dimanapun. Pelaku diplomasi ekonomi perlu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa berbagai komitmen kerja sama ekonomi yang telah dicapai ditindaklanjuti

dan membawa hasil konkret dan manfaat bagi rakyat. Peran KBRI yang selama ini masih lebih banyak membantu teknis administratif dan belum secara intens menjual potensi ekonomi daerah harus lebih ditingkatkan, di antaranya dengan selalu memperbaharui *website* KBRI dengan data terbaru.⁴³ Dengan meningkatnya tuntutan tersebut perwakilan Indonesia di luar negeri harus mempunyai *networking* yang luas dengan pengusaha atau pihak yang berwenang di bidang ekonomi di negara tempatnya bertugas. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi ke depan, diplomasi ekonomi kementerian luar negeri harus memiliki hasil konkret yang bisa ditindaklanjuti karena fungsinya sebagai ajang promosi bukan lagi sekedar *event organizer*.⁴⁴

Pembangunan ekonomi nasional dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi, merupakan tugas dan pekerjaan yang mendesak dan memerlukan kerjasama. Kementerian luar negeri berupaya membantu mengenalkan potensi daerah ke luar negeri. *Pertama* adalah untuk mempromosikan potensi ekonomi, perdagangan dan investasi yang dimiliki oleh daerah. *Kedua* adalah untuk menciptakan hubungan diantara para aktor ekonomi daerah dengan para partner mereka di luar negeri. Dengan melihat secara langsung bagaimana potensi yang ada di daerah akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai berbagai peluang bisnis yang bisa dikembangkan bersama. Hal ini sangat membantu keterbatasan daerah untuk melakukan promosi ke setiap negara, selain memakan biaya tentunya juga waktu. Oleh karena itu Kementerian Luar Negeri telah memiliki program yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi dengan cara promosi perdagangan dan investasi daerah, yaitu di antaranya:

³⁹ Pedoman Umum Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi, BPPK, 2015.

⁴⁰ Darmansjah Djumala, *Membumikan Diplomasi Ekonomi: Tantangan Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi – JK*, <http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/02%20Ekonomi/Membumikan%20Diplomasi%20Ekonomi%20Tantangan%20Kebijakan%20Luar%20Negeri%20Era%20Jokowi%20dan%20JK%20%28Ekonomi%29.pdf>, 2014, diakses 29 September 2015.

⁴¹ *Anak Agung Banyu Perwita*, *Dinamika Global dan Diplomasi Ekonomi Indonesia*, <http://thepresidentpostindonesia.com/2012/09/17/dinamika-global-dan-diplomasi-ekonomi-indonesia/>.

⁴² Renstra Kemenlu 2015-2019, *Op.cit.*

⁴³ Wawancara dengan bapak Danang, kabid perdagangan luar negeri BKPM Sumatera Barat, pada tanggal 9 Juni 2015.

⁴⁴ Wawancara dengan Noviendi Makalam, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pariwisata, pada tanggal 16 Mei 2015.

a. **Updates From The Region (UFTR)** adalah agenda tahunan Kemlu sejak tahun 2007.⁴⁵ UFTR merupakan forum yang diselenggarakan dua kali setahun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi usaha daerah kepada para diplomat, pengusaha dan investor asing. Kegiatan UFTR ini menjembatani terciptanya hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak di luar negeri. Kemenlu mengorganisir kunjungan perwakilan negara-negara asing untuk melihat secara langsung potensi ekonomi daerah. Perwakilan asing yang datang diharapkan akan dapat mengundang mitra yang tepat di negaranya masing-masing untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai informasi mengenai potensi daerah serta berinteraksi langsung dengan para pengusaha dan perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya pada sesi 'Forum Bisnis' para peserta mendengarkan secara langsung presentasi bisnis yang disampaikan oleh Gubernur. Pada sesi acara *on site visit tour* para peserta diajak berkeliling kawasan untuk melihat secara langsung potensi ekonomi daerah. Kegiatan ini diharapkan akan membangun jejaring komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, industri dan bisnis di daerah dengan mitra bisnis luar negeri.

b. **Forum Komunikasi dan Koordinasi Kehumasan Instansi Pemerintah (BAKOHUMAS)** Badan koordinasi humas-humas (Bakohumas) pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN dan BUMD, serta Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia berada dibawah kewenangan Kominfo. Kementerian Luar

Negeri menjadi bagian dari Bakohumas dalam menyelenggarakan Forum untuk meningkatkan koordinasi berbagai program Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2011. Pertemuan Forum BAKOHUMAS menjadi momen yang penting sebab kegiatan diplomasi tidak mungkin diemban sendiri oleh Kementerian Luar Negeri.⁴⁶ Peranan pejabat Kehumasan di daerah sangat diperlukan dalam rangka menyuarakan kepada publik hasil-hasil yang telah dicapai sejauh ini dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia. Diharapkan melalui Forum Bakohumas, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mendukung Nawacita terkait kerja sama luar negeri, serta menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia dapat tercapai.

c. **Forum Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah**

Forum Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah merupakan program baru yang dilaksanakan di era pemerintahan Joko Widodo. Program ini didasari oleh perlunya kerjasama yang erat antara Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah ini dilaksanakan dengan dasar:

- Pasal 28 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwa "Koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dari pelaksanaan politik luar negeri diselenggarakan oleh Menteri", yang dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri.
- Pasal 367 ayat 1, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa "Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi: pengembangan ilmu pengetahuan dan

⁴⁵ Bahan masukan FGD P3DI dengan Asianto Sinambela, wakil ketua Satgas Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan, pada tanggal 12 Mei 2015.

⁴⁶ Bakohumas 2015: Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dukung Nawacita dalam Kerja Sama Luar Negeri, 4 Juni 2015, http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemId=fb66ed05-ecce-4744-8ef8-76c061e8299f, diakses 9 September 2015.

teknologi; pertukaran budaya; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; promosi potensi daerah; dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Forum Komunikasi reguler ini baru mulai dilaksanakan tahun 2015 dalam rangka memperkuat Forum Koordinasi Kemlu dengan Pemda yang telah diselenggarakan sekali setahun sejak 2011. Forum ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan antara Kemlu selaku koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, dengan Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya sebagai pelaku hubungan luar negeri. Peserta forum komunikasi ini adalah Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Pemda di Jakarta.⁴⁷ Forum Komunikasi ini merupakan wadah atau media untuk berdiskusi, bertukar pandang, berkonsultasi dan saling memberikan *updates* mengenai perkembangan terakhir, potensi dan bahkan termasuk persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang menyangkut kepentingan daerah.⁴⁸ Forum komunikasi ini akan secara aktif akan mencari peluang ekonomi, khususnya di bidang maritim, peningkatan ekspor, wisatawan mancanegara dan investasi.

Forum Koordinasi maupun Forum Komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah merupakan dua forum yang saling mengisi dan bersinergi guna meningkatkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah.

⁴⁷ Kemlu dan Pemda Selenggarakan Forum Komunikasi Reguler, <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2015/februari/Diplomasi%20Februari%202015%20%28Final%29.pdf>, diakses 22 September 2015.

⁴⁸ Pidato Sambutan Duta Besar Esti Andayani, Forum Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah “Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Diplomasi Ekonomi RI”, Jakarta, 18 Februari 2015.

d. Kegiatan Temu Usaha

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang para pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) di daerah untuk berdialog dan menjajaki peluang bisnis dengan para pejabat dari perwakilan negara asing yang ada di Indonesia, serta dengan para diplomat Indonesia yang akan ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri. Bersifat *ad hoc* dan merupakan bagian dari upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk “membumikan” diplomasi ekonomi. Acara ini diharapkan dapat bermanfaat langsung bagi para pengusaha IKM dalam menangkap peluang pasar. Terdapat acara Klinik Akses Bisnis memungkinkan para pengusaha bertemu langsung dengan calon investor, dalam hal ini wakil-wakil kedutaan negara-negara asing. Pengusaha daerah dapat menanyakan informasi maupun peluang-peluang apa saja yang dapat mereka raih di negara tujuan.

Selama ini Perwakilan RI di luar negeri banyak mengirimkan informasi permintaan produk dan komoditi oleh pengusaha setempat, namun belum banyak dimanfaatkan dari pengusaha IKM karena tidak bagaimana cara menindaklanjutinya. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mendorong dan memfasilitasi pengusaha IKM untuk menindaklanjuti berbagai permintaan tersebut. Program ini dianggap bermanfaat oleh IKM daerah sehingga diharapkan berkesinambungan.

Kegiatan Kementerian Luar Negeri yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi dengan cara promosi perdagangan dan investasi daerah tersebut diatas dilaksanakan rata-rata dua kali setahun. Frekuensi yang terbatas tersebut masih kurang untuk memberi informasi bagi daerah akan peluang ekonomi yang ada di luar negeri. Kemenlu memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program ini karena harus berbagi anggaran dengan berbagai program diplomasi publik lainnya. Sementara daerah juga memiliki keterbatasan anggaran untuk sering melakukan sendiri pameran perdagangannya ke luar negeri. Pihak Kemenlu dan daerah lebih banyak menunggu inisiatif

dari pihak asing untuk bekerja sama di bidang ekonomi.

C. Kesiapan Daerah

Persaingan tajam sebagai dampak globalisasi mempengaruhi tatanan ekonomi dunia. Proses globalisasi ini telah meningkatkan kadar hubungan interdependensi tidak saja antar negara, tetapi juga antar daerah di lain negara. Hal ini terlihat dengan terjadinya *multisourcing* dalam produk global dan memunculkan peluang bagi daerah untuk menjadi bagian dari produksi global. Setiap negara dan juga daerah harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan produktivitas paling optimal agar mempunyai daya saing tinggi di pasar global. Dalam hal ini pelaksanaan diplomasi multi jalur memerlukan koordinasi yang efektif agar tidak terjadi konflik kepentingan yang merugikan pencapaian kepentingan nasional. Koordinasi kebijakan secara tradisional biasanya berujung pada sentralisasi kekuasaan yang pada gilirannya menjadi tidak efektif karena setiap pihak yang terkait hanya mementingkan dirinya sendiri.⁴⁹ Karena itu yang lebih banyak harus didorong adalah mekanisme koordinasi melalui *policy network* yang bersinergi demi kepentingan nasional.

Saat ini Pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah melaksanakan kerja sama dengan pihak luar negeri demi memajukan pembangunan daerahnya. Dalam bidang ekonomi, secara tidak terhindarkan pemerintah daerah harus menghadapi proses liberalisasi arus barang, jasa, modal dan tenaga kerja dengan segala implikasinya. Pemerintah daerah dituntut untuk memberi respons terhadap tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perekonomian dunia. Respons daerah akan turut mempengaruhi keseluruhan diplomasi ekonomi Indonesia. Secara positif hubungan luar negeri yang dilakukan daerah bisa mendukung kebijakan pemerintahan pusat, tetapi secara negatif hubungan tersebut bisa juga membawa kerugian bila terjadi proses eksploitasi akibat ketidaksetaraan posisi dan kurangnya koordinasi

⁴⁹ *Ibid.*, h.29.

antar instansi pemerintah.⁵⁰ Kementerian Luar Negeri telah memberikan dukungan kepada paradiplomasi ekonomi di daerah dengan UFTR mendatangkan pihak luar negeri ke daerah. Masih banyak upaya yang harus dilakukan baik oleh Kemlu maupun daerah agar dukungan tersebut membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan daerah. Diantaranya adalah kerjasama kemlu dengan Pemda melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut.

Pemerintah pusat berperan penting menciptakan kondisi politik dan keamanan yang stabil, kondusif, dan dapat menjamin kepastian dan keamanan berusaha di berbagai daerah di Indonesia. Instabilitas dapat menyebabkan terjadinya penurunan PMA. Selain itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi dalam mendukung pembangunan industri dan perdagangan ditentukan pula oleh adanya penegakan hukum yang mencerminkan konsistensi pemerintah. Dilain pihak daerah juga harus bekerja keras. Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing ditentukan oleh empat faktor, yakni kebijakan pemerintah, kelembagaan, kemampuan, serta birokrasi yang efisien. Daya saing ekonomi daerah tidak dapat dilihat dalam ukuran nasional berupa daya saing antar ekonomi daerah, tetapi harus bersaing dalam ukuran internasional. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah harus didesain dengan ukuran internasional.⁵¹

Daerah yang siap untuk melaksanakan paradiplomasi bidang ekonomi harus siap dengan konsep dan target tertentu yang ingin dicapai. Tanpa pemahaman dan visi yang sama di antara pemangku kepentingan yang beragam, tidak saja di tingkat nasional namun juga di tingkat daerah, mengenai apa yang harus dicapai oleh kebijakan luar negeri pelaksanaan paradiplomasi menjadi tidak efektif. Paradiplomasi yang efektif akan muncul dari pemahaman dan visi yang didefinisikan dan didukung bersama dan dikoordinasikan dengan baik di dalam negeri.

⁵⁰ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008 (cetakan Pertama), h. 127.

⁵¹ Hendra Halwani, *Op.cit.*, h. 386-387.

Dalam era globalisasi ini tujuan dan sasaran diplomasi dimulai dan berakar pada kepentingan nasional. Namun dalam pelaksanaannya paradiplomasi yang dilakukan daerah masih bertujuan kepentingan daerah semata. Adanya perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah dan kurangnya koordinasi. Dalam hal paradiplomasi ekonomi, Baik Sumatera Barat maupun Jawa Barat mengakui kedatangan PMA dapat lebih meningkatkan iklim usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang dimiliki investor. Dalam hal ini daerah secara efisien perlu menempuh kebijakan berorientasi ke pasar internasional dengan jajaran birokrasi yang *economy minded* atau *business minded*.⁵² Tanpa berbagai kesiapan tersebut akan sulit bagi daerah untuk bersaing.

Sebagai contoh, di Sumatera Barat Dalam kegiatan UFTR di Padang Sumatera Barat pertengahan tahun 2015. Meski ada tindak lanjut sejumlah peninjauan PMA perkebunan, peternakan infrastruktur, di antaranya PMA perkebunan buah alpukat di Kabupaten Solok, namun hasilnya dianggap belum maksimal. Salah satu masalah yang menghambat PMA di Sumatera Barat adalah status lahan yang banyak berupa tanah ulayat, sementara PMA membutuhkan kejelasan status tanah yang siap untuk PMA (*clean and clear*).⁵³ Usaha bordir sulam dan kuliner yang ternyata masih bersifat rumahan sehingga sulit memenuhi kuota jumlah dan kualitas ekspor yang diminta pembeli luar negeri. Tanpa adanya hasil maksimal sebagai *feed back* berupa PMA di Sumbar akan sulit bagi Pemda untuk meyakinkan DPRD akan pentingnya paradiplomasi ekonomi bagi daerah. Pemda Sumbar berharap Kemlu melakukan tindak lanjut kepada pihak kedutaan yang ikut untuk melakukan PMA di Sumbar. Namun Kemlu tidak dapat menjamin peserta UFTR pasti melakukan PMA di provinsi tersebut.⁵⁴

⁵² Halwani, *op.cit.*, h. 387-388.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Gusti Ruvita, Kasubid Produksi Bidang KPKP Ekonomi Bappeda Sumatra Barat, pada tanggal 9 Juni 2015.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wardarusmen, Kabiro perekonomian Sekda Sumatera Barat, pada tanggal 8 Juni 2015.

Manfaat ekonomi dalam program sister city tipe *transborder paradiplomacy* antara Kota Bukit Tinggi dengan Kota Seremban di Negeri Sembilan Malaysia tidak terlalu besar. *Sister city* kedua kota tersebut dilaksanakan lebih karena faktor kedekatan sejarah. Kota Bukit Tinggi merupakan wilayah industri cinderamata diantaranya kuliner keripik/kerupuk dan rendang dan kerajinan tenun, border/sulam. Namun perdagangan kedua pihak lebih banyak dilakukan secara informal, sebagai barang tentangan atau oleh-oleh yang tidak tercatat di dinas perdagangan kota.⁵⁵ Potensi ekonomi UMKM daerah diantaranya industri kuliner dan kerajinan tangan masih memerlukan pihak ketiga sebagai pemasaran di pasar internasional.⁵⁶ Upaya Pemda mempromosikan melalui Rumah Gadang di Seremban terkendala biaya promosi dan sifat usaha yang masih berupa industri rumahan. Sektor perdagangan merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Dalam hal ini banyak investor dari Malaysia dan Singapura memiliki keunggulan dalam keuangan, keterampilan manajemen, penguasaan teknologi dan jaringan internasional mampu meraih keuntungan yang lebih besar dalam perdagangan tersebut. Malaysia dan Singapura dengan kemampuan kemasan yang lebih baik menjadi negara singgah dan paten dari produk Sumbar, sementara pengusaha lokal hanya menjual putus tanpa nama.⁵⁷

Dengan melihat kondisi diatas Pemda Sumbar menganggap promosi potensi ekonomi Sumbar ke luar negeri lebih efektif memanfaatkan ikatan primodial dengan warga Minang di rantau, terutama para diplomat berdarah Minang. Kegiatan paradiplomasi dapat menjadi kegiatan eksploitasi ketika

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Azhari, Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hendry, Kabid Ekonomi Bappeda Kota Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hendry, Kabid Ekonomi Bappeda Kota Bukit Tinggi dan Bapak Azhari, Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015.

tidak ada kesiapan dan strategi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak asing. Sebaliknya ketika kesiapan dan strategi matang telah disusun, maka terwujudlah kegiatan paradiplomasi yang berbasis eksplorasi potensi dan manfaat, mulai dari alih teknologi, bergeliatnya pembangunan dan ekonomi daerah.

Sementara di Jawa Barat, Kemlu telah melibatkan Jabar sebagai peserta dalam diplomasi ekonomi, terutama jika ada penawaran/promosi yang datang dari negara-negara yang secara tradisional bukanlah mitra dagang Indonesia seperti Afrika, Asia Tengah, Arab Magribi. Posisi kota Bandung sebagai kota asal Konferensi Asia Afrika membantu memperkenalkan Bandung dan Jabar ke negara-negara di wilayah tersebut. Namun mayoritas kerjasama antar pemerintah masih lebih banyak dilakukan dengan Tiongkok. Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya informasi yang didapat, baik itu informasi umum tentang negara mitra maupun tatacara hubungan kerjasama dengan pihak asing, kurangnya koordinasi, dan banyaknya aturan perdagangan yang terkadang tumpang tindih. Upaya meningkatkan perdagangan pelaku usaha UKM di Jabar dengan pihak pembeli dari luar negeri masih terkendala pada keterbatasan penguasaan bahasa asing dan besarnya biaya prosedur pengiriman barang keluar negeri yang diistilahkan dengan “buka gembok”. Dalam kondisi ini semangat pengusaha kecil daerah untuk berpromosi ke luar negeri menjadi surut. Pelaku usaha UKM lebih memilih pembeli dari luar negeri yang datang ke daerahnya untuk membeli secara beli putus dan e-dagang.⁵⁸ Namun seringkali dalam sistem beli putus ini hak paten pengusaha daerah diabaikan karena pembeli akan memberi merknya sendiri. Selain daripada itu daerah yang menjadi basis produksi kurang dikenal secara internasional. Dalam hal kerjasama pendidikan, pengiriman PNS penerima beasiswa dari negara mitra dalam

⁵⁸ Wawancara dengan Dr. Deni Rahayu, Kepala Bagian Industri dan perdagangan, UMKM, dan Parawisata Biro Perekonomian Setda Jabar, pada tanggal 26 Agustus 2015.

jumlah yang banyak terkendala oleh kapasitas Pemprov Jabar untuk memberikan biaya hidup selama mereka di luar negeri.

Secara umum kendala efektifitas paradiplomasi ekonomi adalah belum lengkap data atau pemetaan potensi daerah mitra diluar negeri, terutama pada negara-negara non tradisional. biaya promosi daerah ke luar negeri yang terbatas dan lambatnya respon dari pihak luar dalam proses kerjasama. Hal ini terasa pada saat para pelaku usaha daerah diharapkan dapat menjadi penggerak utama (*prime movers*) dalam berbagai proyek kerjasama yang disepakati. Selain itu adanya keterbatasan anggaran dan perizinan keluar negeri bagi bagi Pemda dari pemerintah pusat. Masalah biaya promosi ke luar negeri yang besar menjadi kendala hampir di semua provinsi. Sebagai fasilitator biaya pendampingan dari pemda kepada delegasi pengusaha kecil daerah yang akan berpameran di luar negeri terbatas. Upaya promosi Pemda ke luar negeri secara langsung kadang tidak disetujui oleh Kemendagri tanpa aturan tertulis yang jelas mengenai jenis dan aturan paradiplomasi ekonomi yang diijinkan dengan alasan penghematan. Kebijakan kemendagri tersebut dipandang bertentangan dengan semangat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam promosi dagang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 75-81.⁵⁹

Kebijakan paradiplomasi untuk memajukan kepentingan nasional harus menjadi tujuan dan agenda bersama. Pengambilan keputusan harus merupakan hasil kompromi. Setiap pihak yang terkait.⁶⁰ Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri merupakan jalan penting karena bisa membentuk pilihan akhirnya. Pada kasus Sumatera Barat keterlibatan provinsi ini pada diplomasi ekonomi Indonesia tampak belum terfokus. Pemda Sumbar menawarkan kerjasama PMA bidang energi dan pembangunan

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Wardarusmen, Kabiro perekonomian Sekda Sumatra Barat, pada tanggal 8 Juni 2015.

⁶⁰ Alex Mintz and Karl De Rouen Jr, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, NY: Cambridge University Press, 2010, h.160-170.

infrastruktur, sementara minat PMA di provinsi ini lebih kepada investasi pertanian skala kecil. Sementara di Jawa Barat hasil yang didapat lebih baik dengan menyatukan kepentingan pusat dan daerah melalui pembentukan kawasan industri di Bekasi. Untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang semakin besar, koordinasi antar stake holder sangat diperlukan. Dalam hal paradiplomasi, faktor ekonomi tidak diragukan lagi memberikan motivasi kuat pada daerah untuk aktif dalam perekonomian global. Daerah adalah “pemilik” dari kekayaan alam dan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya.⁶¹

Di tengah tantangan globalisasi ekonomi, kebijakan pembangunan ekonomi tidak mungkin lagi hanya terpusat di ibukota. Daerah harus muncul sebagai bagian penting dari perdagangan internasional dalam persaingan di pasar global. Namun belum semua daerah mampu mengikuti gerak diplomasi ekonomi karena kurangnya sosialisasi program pemerintah pusat tersebut dan pelaksanaannya masih kurang menjangkau dan melibatkan daerah.⁶² Upaya Kementerian Luar Negeri membantu mempromosikan kerjasama ekonomi daerah dengan mitranya di luar negeri melalui UFTR, Bakohumas, forum komunikasi dan kegiatan temu usaha masih dianggap belum cukup informatif. Salah satu kendalanya adalah peserta yang dikirim mengikuti caranya tersebut terbatas atau mengalami rotasi, sehingga informasi yang didapat terputus. Upaya melalui kegiatan temu usaha antar pihak pembeli luar negeri dengan produsen UMKM di Indonesia lebih efektif, namun kegiatan ini masih jarang dilakukan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah daerah dapat berperan penting membantu suksesnya diplomasi ekonomi melalui jalur paradiplomasi bila ada

koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan setiap pihak yang terkait. Dengan menguatnya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan bermunculannya para pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang proaktif melakukan terobosan dalam pembangunan daerahnya, paradiplomasi dapat menjadi bagian kekuatan diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan mengasumsikan bahwa *economic foreign policy* berawal dari kapasitas dan kemampuan domestik suatu negara, maka pemerintah (pusat dan daerah) patut mengupayakan berbagai formulasi kebijakan yang dapat mendorong kesiapan domestik secara menyeluruh.

Indonesia perlu secara lebih serius melibatkan daerah dalam diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan bersifat jangka panjang. Ketidakmampuan kita dalam menghasilkan perangkat diplomasi ekonomi yang utuh, komprehensif dan berjangka panjang hanya akan menghasilkan berbagai output ekspor yang terbatas. Sebaliknya, apabila kita dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi maka hal ini akan berdampak sangat signifikan bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi nasional Indonesia. Untuk itu dibutuhkan suatu *strategic partnership* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang pasar internasional. Makin beragamnya aktor hubungan luar negeri selain negara (*non-state actors*) sangat membantu diplomasi ekonomi Indonesia. Beragam aktor tersebut dapat digunakan Indonesia sebagai model diplomasi multi-jalur untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Dengan semangat *locally integrated and internationally connected*, Pemerintah (Kemlu) terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan peluang pasar potensial (*untapped market*) dan memaksimalkan pasar tradisional yang dimiliki Indonesia.

B. Saran Rekomendasi

- Perlu ada pemetaan potensi dan sektor unggulan yang diperbarui secara berkala di setiap daerah kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia, dalam bentuk *database*

⁶¹ Wawancara dengan bapak Danang, kabid perdagangan luar negeri BKPM Sumatra Barat, pada tanggal 9 Juni 2015.

⁶² Wawancara dengan Bapak Hendry, Kabid Ekonomi Bappeda Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015.

yang mudah diakses melalui online. Hal ini penting sebagai data awal yang untuk memudahkan pihak yang ingin melakukan kerja sama dengan daerah-daerah di Indonesia. Hal ini juga memudahkan bagi perwakilan RI di seluruh dunia untuk membantu dalam proses *matchmaking* kerja sama yang efektif antara daerah dengan pihak luar negeri.

- Sebaiknya ada bagian/unit khusus yang menangani kegiatan paradiplomasi di Pemda. Hal ini perlu agar Pemda dapat lebih fokus dan terencana melaksanakan paradiplomasi. Adanya unit khusus ini juga mempermudah pihak luar yang ingin bekerja sama dengan Pemda.
- Perlu ada pemantauan tindak lanjut dari kegiatan promosi ekonomi kementerian luar negeri di daerah agar program ini lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bayne, N and Woolcock, S,(eds). *The New Economic Diplomacy*, Ashgate Publishing, Hampshire, England, 2007.
- Halwani, Hendra *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, edisi kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Kuznetsov, Alexander S. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*, London: Routledge, 2015.
- Lecours, André. *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2008.

Madu, Ludiro dkk (ed.) *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*", Ludiro dkk (ed.) Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Malhotra, Naresh, *Basic Marketing Research: Applications To Contemporary Issues*, 5 Edition, London: Prentice Hall, 2002.

Mintz, Alex and Karl De Rouen Jr, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, NY: Cambridge University Press, 2010.

Morgenthau, Hans J. *Politik Antarbangsa*, terjemahan Cecep Sudradjat, Jakarta, Yayasan Obor, 2010.

Pedoman Umum Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi, BPPK, 2015.

Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Sister City Bandung Colorful, Beautiful and Friendly, Bandung; Bagian Kerjasama Daerah Pemda Bandung, 2013.

Winarno, Budi. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

Portal

"A New Foreign Policy Era," http://www.pearsonhighered.com/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205853641.pdf diakses 14 April 2014.

Ariadi, Kurniawan, "Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia", <https://godedeahead.wordpress.com/2009/12/16/paradiplomasi-dalam-politik-luar-negeri-indonesia/16> Desember 2009, diakses 29 September 2015.

-----, "Paradiplomasi, Otonomi Daerah," <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F21849/Paradiplomasi.html>, diakses 8 April 2016.

"Bakohumas 2015: Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dukung Nawacita dalam Kerja Sama Luar Negeri," 4 Juni 2015, http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemId=fb66ed05-ecee-4744-8ef8-76c061e8299f, diakses 9 September 2015.

- Cornago, Noé., "Exploring the Global Dimensions of Paradiplomacy Functional and Normative Dynamics in the Global Spreading of Subnational Involvement in International Affairs," October 2000, <http://www.forumfed.org/en/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-int-cornago.pdf>, diakses 30 Maret 2015.
- Daniel Tencer, "World's Economic Centre of Gravity Shifting Back to Asia At Unbelievable Speed: McKinsey Institute", The Huffington Post Canada, <http://www.huffingtonpost.ca>, diakses 27 Oktober 2014.
- Djumala, Darmansjah. "Membumikan Diplomasi Ekonomi: Tantangan Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi – JK," <http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/02%20Ekonomi/Membumikan%20Diplomasi%20Ekonomi%20Tantangan%20Kebijakan%20Luar%20Negeri%20Era%20Jokowi%20dan%20JK%20%28Ekonomi%29.pdf,2014>, diakses 29 September 2015.
- Evans, Tim, "Diplomacy from an Economic Perspective," Middlesex University London, presentasi dalam *Leading and Managing Diplomacy*, London, 2015.
- "Gubernur BI: Investasi Jabar Unggul Dibanding Provinsi Lain," 13-November-2014, [binesia.com/home/berita/2981](http://www.binesia.com/home/berita/2981), diakses 7 April 2016.
- <http://archive.kaskus.co.id/thread/5842949/0/ini-hasil-kerja-gubernur-sumbar-oleh2-german>, diakses 2 Mei 2016.
- Ihsan, Faris. "Peluang Pemda Dalam Kerja sama Internasional," <http://bkddiklat.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/PELUANG-PEMDA-DALAM-KERJASAMA-INTERNASIONAL.pdf>, diakses 8 April 2016.
- Joko Susilo, "Dubes Menjadi Salesman," 24/06/14, <http://www2.Jawapos.com/baca/opinidetil/3255/Dubes-Menjadi-Salesman>, diakses 29 September 2015.
- "Jokowi minta Duta Besar lakukan diplomasi ekonomi dan dagang," [Merdeka.com](http://www.merdeka.com), <http://www.merdeka.com>, 8 Oktober 2014, diakses tanggal 24 Oktober 2014
- Keating, Michael., "Paradiplomacy and Regional Networking," www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-eu-keating.pdf
- "Kemlu dan Pemda Selenggarakan Forum Komunikasi Reguler," 18 February 2015, http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-newsLike.aspx?l=id&ItemID=0bdd2690-a2e7-4715-ae4f-ed8d61d3649b, diakses 30 Maret 2015.
- "Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/Kp/Xii/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah," <http://www.kemlu.go.id/Books/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf> diakses 14 April 2014.
- Perwita, Anak Agung Banyu. "Dinamika Global dan Diplomasi Ekonomi Indonesia," <http://thepresidentpostindonesia.com/2012/09/17/dinamika-global-dan-diplomasi-ekonomi-indonesia/>
- "Renstra Kemenlu 2015-2019," http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/ENSTRA%20KEMENLU%202015-2019%20FINAL%20DONE%20SK%20MENLU%20pdf%20version.pdf, diakses 22 September 2015
- "Tingkatkan Kerjasama, Padang-Perth Jadi Sister City," <http://kabar24.bisnis.com/read/20150911/19/471535/tingkatkan-kerjasama-padang-perth-jadi-sister-city>, diakses 2 Mei 2016.
- "Tiga Dirjen di Departemen Luar Negeri Dihapus," 28 Oktober 2001, <http://nasional.tempo.co/read/news/2001/10/28/05512931/tiga-dirjen-di-departemen-luar-negeri-dihapus>, diakses 10 September 2015

“West java Inc,” <http://www.westjavainc.org/tentang/west-java-inc/> diakses 18 April 2016.

Wolff, Stefan., “Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges,” www.Stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf. diakses 30 Maret 2015

Koran/Majalah

Djumala, Darmansjah, “Membumikan Politik LN”, *Kompas*, 28 Mei 2014

-----, “Reorientasi Diplomasi Ekonomi”, *Gatra*, edisi 11 Juni 2014.

-----, “Diplomasi Dalam Tafsir Trisakti”, *Gatra*, edisi 15 Oktober 2014.

Bahan paparan Sekretariat Daerah Kota Bandung Pada kunker Komisi I pada tanggal 13 November 2014.

Bahan masukan FGD P3DI dengan Asianto Sinambela, wakil ketua Satgas Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan, pada tanggal 12 Mei 2015.

Pidato Sambutan Duta Besar Esti Andayani, Forum Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah “Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Diplomasi Ekonomi RI”, Jakarta, 18 Februari 2015

Dokumen/Lain-Lain

Bimantara, I. B. Made, “Indonesia Memerlukan Diplomasi Ekonomi Yang Kuat Guna Menopang Pertumbuhan Domestik”, *Tabloid Diplomasi*, No. 73 tahun VII, 2014.

Dimas, Lourentius, “Peran dan Kewenangan Kemlu dalam Diplomasi Ekonomi Masih Terbatas”, *Tabloid Diplomasi*, No. 73 tahun VII, 2014.

Kilian, P. M. Erza, “Diplomasi Ekonomi Indonesia Masih Bersifat Tradisional”, *Tabloid Diplomasi*, No. 73 tahun VII, 2014.

Perwita, Anak Agung Banyu Perwita, “Peran Diplomasi Ekonomi Sebagai Salah Satu Instrumen Penting Dalam Politik Luar Negeri”, *Tabloid Diplomasi*, No. 73 tahun VII.2014.

Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, *Tabloid Diplomasi* Edisi Mei 2012.

Wawancara

1. Danang W. Jati, Kabid Perdagangan Luar Negeri BKPM Sumatera Barat, pada tanggal 9 Juni 2015.

2. Hendry, Kabid Ekonomi Bappeda Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015

3. Wardarusmen, Kabiro perekonomian Sekda Sumatera Barat, pada tanggal 8 Juni 2015.

4. Deni Rahayu, Kepala Bagian Industri dan Perdagangan, UMKM, dan Parawisata Biro Perekonomian Setda Jabar, pada tanggal 26 Agustus 2015.

5. Gusti Ruvita, Kasubdid Produksi Bidang KPKP Ekonomi Bappeda Sumatera Barat, pada tanggal 9 Juni 2015.

6. Azhari, Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi pada tanggal 11 Juni 2015.

7. Neni Rohaeni, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Otda dan Kerjasama Pemda Jabar, pada tanggal 26 Agustus 2015.

8. Sastie. Y.D, Subbid Fasilitasi dan Kerjasama Bidang Penanaman Modal BMPT Pemda Jabar, pada tanggal 26 Agustus 2015.